

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan atau Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 072-073 PUU-II 2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 *Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 *Tentang Pengembalian Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024*

Putusan Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Nomor Register Permohonan 001/PS.REG/33.3306/III/2020

Putusan Bawaslu Kabupaten Kendal dalam sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 Nomor Register 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024

### **Buku**

- Creswell, John W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research Fourth Edition*. Boston : Pearson Education, Inc.
- . (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. (2024). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kendal 2024*. Kendal: Dispendukcapil Kabupaten Kendal.
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Joseph, Oliver, dan Frank McLoughlin. (2019). *Electoral Justice System Assessment Guide*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Orozco-Henríquez, J. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). (2019). *Handbook for The Observation of Election Dispute Resolution*. Warsaw: Organization for Security and Co-operation in Europe.
- Pemerintah Kabupaten Kendal. (2024). *Potret Wilayah Kabupaten Kendal 2024*. Kendal: Pemerintah Kabupaten Kendal.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Fajar Media Press.
- . (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa.
- . (2025). *Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen: Evaluasi Pemilu Tahun 2024 dan Proyeksi Pemilu Tahun 2029*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Umar, H. (2003). *Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### **Jurnal**

- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-26.

- Laili, D. N., & Prasetyawan, Y. Y. (2025). Pengalaman informasi orang Kalang di Kendal terkait warisan budaya tak benda (WBTB) tradisi Kalang Obong. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 14(1), 49–62.
- Mawadda, A. I., & Dana, I. W. (2023). Kajian hasil rekonstruksi Tari Opak Abang di Kabupaten Kendal. *Jurnal Tari, Teater, dan Wayang*, 6(1), 13–25.
- Tanzil, D. (2021). Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 38-57.
- Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 9-23.

### Skripsi

- Permana, S. H. (2014). *Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013: Masalah dan Penyelesaian* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

### Website

- Antara News Sumut. (2024). KPU Labura kembalikan berkas bacalon bupati dari PDI Perjuangan. *Antara News Sumut*. Retrieved from [<https://sumut.antaranews.com/berita/587603/kpu-labura-kembalikan-berkas-bacalon-bupati-dari-pdi-perjuangan>](<https://sumut.antaranews.com/berita/587603/kpu-labura-kembalikan-berkas-bacalon-bupati-dari-pdi-perjuangan>)
- Detik Jateng. (2024). Dico gugat KPU Kendal gegara terancam gagal nyabup, ini kata pakar UNS. *Detik.com*. Retrieved from [<https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7518341/dico-gugat-kpu-kendal-gegara-terancam-gagal-nyabup-ini-kata-pakar-uns>](<https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7518341/dico-gugat-kpu-kendal-gegara-terancam-gagal-nyabup-ini-kata-pakar-uns>)
- Detik Sumbagsel. (2024a). Berkas belum lengkap, KPU kembalikan berkas 1 paslon Empat Lawang. *Detik.com*. Retrieved from [<https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7523354/berkas-belum-lengkap-kpu-kembalikan-berkas-1-paslon-empat-lawang>](<https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7523354/berkas-belum-lengkap-kpu-kembalikan-berkas-1-paslon-empat-lawang>)
- Detik Sumbagsel. (2024b). KPU Lampung Timur tolak pendaftaran Dawam-Ketut, ini penyebabnya. *Detik.com*. Retrieved from [<https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7525401/kpu-lampung-timur-tolak-pendaftaran-dawam-ketut-ini>]

- penyebabnya](<https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7525401/kpu-lampung-timur-tolak-pendaftaran-dawam-ketut-ini-penyebabnya>)
- Detik Sumut. (2024). Respons Masinton usai berkas pendaftarannya ditolak KPU Tapteng. *Detik.com*. Retrieved from [<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7526108/respons-masinton-usai-berkas-pendaftarannya-ditolak-kpu-tapteng>](<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7526108/respons-masinton-usai-berkas-pendaftarannya-ditolak-kpu-tapteng>)
- Kompas.com. (2024). Alasan Dico M. Ganinduto batal lanjutkan sengketa Pilkada Kendal ke PTTUN. *Kompas.com*. Retrieved from [<https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/160720678/alasan-dico-m-ganinduto-batal-lanjutkan-sengketa-pilkada-kendal-ke-pttun>]
- Kompas.id. (2024a). Pengembalian pencalonan oleh KPU dinilai menciptakan fenomena kotak kosong. *Kompas.id*. Retrieved from [<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/10/pengembalian-pencalonan-oleh-kpu-dinilai-menciptakan-fenomena-kotak-kosong>](<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/10/pengembalian-pencalonan-oleh-kpu-dinilai-menciptakan-fenomena-kotak-kosong>)
- Kompas.id. (2024b). Perludem: Gagal mendaftar Pilkada buka peluang laporan ke Bawaslu. *Kompas.id*. Retrieved from [<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/05/perludem-gagal-mendaftar-pilkada-buka-peluang-laporan-ke-bawaslu>](<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/05/perludem-gagal-mendaftar-pilkada-buka-peluang-laporan-ke-bawaslu>)
- Radar Semarang. (2024). Resmi! Dico-Ali dipastikan gagal ikuti kontestasi Pilkada Kendal, Bawaslu putuskan tolak permohonan sengketa pendaftaran. *RadarSemarang.jawapos.com*. Retrieved from [<https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/725088679/resmi-dico-ali-dipastikan-gagal-ikuti-kontestasi-pilkada-kendal-bawaslu-putuskan-tolak-permohonan-sengketa-pendaftaran>]
- RRI. (2024). Dokumen pendaftaran paslon Berbudi ditolak KPU Manokwari. RRI. Retrieved from [<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/955158/dokumen-pendaftaran-paslon-berbudi-ditolak-kpu-manokwari>](<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/955158/dokumen-pendaftaran-paslon-berbudi-ditolak-kpu-manokwari>)
- Suara Jelata. (2024). Tak memenuhi syarat pendaftaran, KPU Brebes tolak paslon Adi Setiawan-Waidin. *Suara Jelata*. Retrieved from [<https://suarajelata.com/2024/09/05/tak-memenuhi-syarat-pendaftaran-kpu-brebes-tolak-paslon-adi-setiawan-waidin/>](<https://suarajelata.com/2024/09/05/tak-memenuhi-syarat-pendaftaran-kpu-brebes-tolak-paslon-adi-setiawan-waidin/>)
- Tribunnews Banyumas. (2024). Banyumas tak punya pilihan paslon, pendaftaran cabup-cawabup Banyumas Ma'ruf-Yulianti ditolak. *Tribunnews*. Retrieved

from [<https://banyumas.tribunnews.com/2024/09/06/banyumas-tak-punya-pilihan-paslon-pendaftaran-cabup-cawabup-banyumas-maruf-yulianti-ditolak?page=2>](<https://banyumas.tribunnews.com/2024/09/06/banyumas-tak-punya-pilihan-paslon-pendaftaran-cabup-cawabup-banyumas-maruf-yulianti-ditolak?page=2>)

United Nations. (n.d.). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Retrieved from [<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>](<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>)

United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from [<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%2021,public%20service%20in%20his%20country>] (<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%2021,public%20service%20in%20his%20country>)